

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data BPS luas Jakarta yakni 662,33 km² jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2015 berjumlah 10.075.310 jiwa dengan kepadatan penduduk 15.212 jiwa/km². Jumlah RW kumuh tahun 2013 sebesar 223 RW kumuh terbagi atas 5 kota 1 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Variabel RW Kumuh berdasarkan evaluasi direktori RW kumuh yang di keluarkan BPS Provinsi DKI Jakarta terdapat 11 kriteria RW kumuh yakni: kepadatan penduduk, tata letak bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, jalan, saluran drainase, jamban, frekuensi pengambilan sampah, cara buang sampah, dan penerangan jalan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jakarta, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Akibat makin banyaknya permukiman kumuh dan liar yang pada gilirannya akan menjadi berat bagi pemerintah Kota Jakarta untuk menanganinya.

Selain itu kekumuhan tersebut juga terjadi akibat ulah dari masyarakat itu sendiri, ini terkait dengan budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya kehidupan sehari-hari yang dimaksud seperti membuang sampah di sembarang tempat, buang air limbah KM/WC tidak di tempat seharusnya tetapi di sungai, laut, saluran, kebun hingga di perkarangan rumah tinggal. Menurut Ridlo (2001), kebanyakan permukiman kumuh berada di tempat-tempat strategis di pusat kota

(sekitar pasar, dekat rumah sakit, di belakang pergudangan); di tengah kota (menempati lahan perkuburan, di tepi sungai, di belakang pertokoan); atau di pinggiran kota (dekat tempat pembuangan sampah, di atas tanggul).

Menurut Cheema (1986) dalam pembangunan kota, pemerintah di negara berkembang memiliki 3 tipe kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan kota, yaitu : (1) Menggusur perkampungan kumuh dan rumah-rumah liar yang ada; (2) Mengurangi jumlah daerah perkampungan miskin dengan memindahkan mereka dan menempatkan kembali di daerah baru di luar kota; (3) Melegalisasi perkampungan kumuh dengan renovasi struktur yang ada dan memberikan bantuan dalam perbaikan lingkungan perumahan mereka.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pada Pasal 96 yaitu: Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Isi pada Pasal 97 yaitu: (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan:

- a. pemugaran;
- b. peremajaan; atau
- c. pemukiman kembali.

Menurut Eko Budiharjo (2005) permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan.

Dalam mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa kebijakan diantaranya:

- a) Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan di kawasan kumuh ringan dan kumuh sedang, contoh kegiatannya adalah MHT Plus dan bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung seperti Kampung Deret.
- b) Program pembangunan baru seperti pembangunan rusunawa
- c) Program peremajaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan di kawasan kumuh berat, contoh kegiatannya adalah pembangunan rusun Tambora dari 4 lantai menjadi 16 lantai.

Pada wilayah administrasi Jakarta Barat jumlah RW kumuh sebesar 55 buah dengan klasifikasi kumuh berat, sedang, ringan, dan sangat ringan. Jumlah ini merupakan yang terbesar di Jakarta sama besarnya dengan jumlah RW kumuh di Jakarta Utara. Berdasarkan data di atas Kelurahan Kapuk merupakan salah satu Kelurahan yang ada wilayah administrasi Jakarta Barat. Sebenarnya Pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha untuk dapat memperbaiki lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Kapuk tersebut, hal ini dapat dilihat dari adanya program-program yang diberikan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh. Program-program yang ada di antaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP), Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Mohammad Husni Thamrin (MHT) plus, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kampung Deret. Namun program-program tersebut belum memberikan hasil yang signifikan terhadap lingkungan permukiman tersebut.

Pelaksanaan Program Kampung Deret telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung. Program kampung deret merupakan program yang diberikan kepada perumahan dan permukiman yang perlu segera ditangani karena kondisi serta kualitas permukiman yang kurang sehat dan kurang tertata. Dalam program tersebut, Pemerintah Provinsi melalui

dana APBD memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga asalkan bersedia menyisakan luas lahan sekitar 1 meter untuk jalan umum. Selain itu juga bersedia memberikan ruang atau jarak antar rumah setidaknya satu meter. Program ini memberikan bantuan Rp.1,5 Juta per meter dengan bantuan maksimal Rp. 56 Juta untuk 36 meter.

Program kampung deret yang sudah direalisasikan di Kelurahan Kapuk sejak kepemimpinan Gubernur Joko Widodo pada bulan Desember 2013 hingga bulan April 2014 itu diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan program untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolak ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan (Dunn, 2000). Sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan program kampung deret di lokasi studi dapat memberikan informasi serta rekomendasi atau usulan pengembangan program tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat menurunkan kualitas dari permukiman yang layak huni dan sehat. Dengan beberapa program penanganan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti PNPMMMP,PPMK, MHT plus, PKK, dan Kampung Deret. Salah satu program yang akan dievaluasi yakni Program Kampung Deret. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan dari adanya Program Kampung Deret yang sudah diimplementasikan di lokasi studi. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Kapuk?
- b. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Kapuk?
- c. Bagaimana rekomendasi atau usulan pengembangan Program Kampung Deret di Kelurahan Kapuk?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi proses pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Kapuk.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Deret di Kelurahan Kapuk
3. Memberikan rekomendasi atau usulan pengembangan Program Kampung deret di Kelurahan Kapuk.

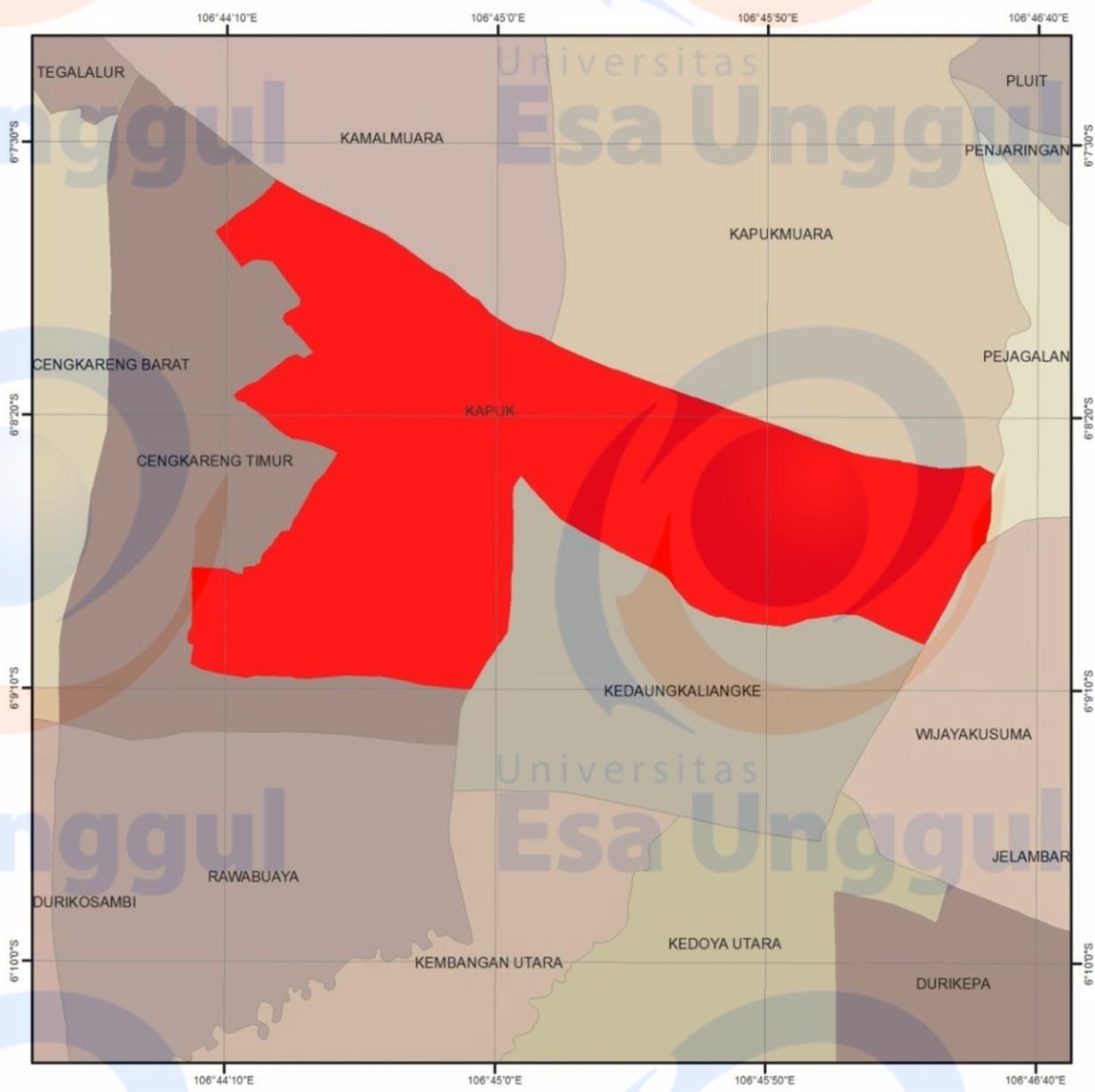
1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi disiplin Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, produk studi dapat digunakan sebagai masukan terhadap konsep dan teori mengenai pelaksanaan program kampung deret.
- b. Bagi pemerintah kota, hasil studi akan memberikan sumbangan mengenai hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan program kampung deret.
- c. Bagi masyarakat setempat, hasil evaluasi akan menyadarkan mengenai pentingnya pemahaman terhadap program kampung deret serta manfaat yang dirasakan dari adanya program ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Studi dilakukan pada wilayah Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Batasan penelitian sesuai dengan batasan administrasi Kelurahan Kapuk.



Gambar 1.1
Peta Orientasi Wilayah Studi

SKALA 1:30,000

0 175 350 700 1,050 1,400 Meters

Legenda

Kelurahan

Cengkareng Barat	Kedoya Utara
Cengkareng Timur	Duri Kepa
Duri Kosambi	Jelambar
Kapuk	Pejagalan
Kedaung Kaliangke	Pluit
Rawa Buaya	Kapuk Muara
Penjaringan	Tegal Alur
Wijaya Kusuma	Kamal Muara

SISTEM PROYEKSI

Projection System : WGS_1984_UTM_Zone_48S
 Projection : Universal_Transverse_Mercator
 Datum : D_WGS_1984

PETA IKHTISAR

MUHAMMAD DICKY HAWASYI (2013-22-0311)

Universitas Esa Unggul
 Fakultas Teknik
 Perencanaan Wilayah dan Kota
 2016